

**PEMERINTAH
KABUPATEN AGAM**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG
KABUPATEN AGAM**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I. Pendahuluan	
1.1. _ Latar Belakang.....	1
1.2. _ Landasan Hukum.....	2
1.3. _ Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. _ Sistematika Penulisan.....	4
Bab II. Gambaran Pelayanan OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	6
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.....	20
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.....	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	33
Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	35
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	39
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.....	42
Bab IV. Tujuan dan Sasaran	
4.1. Tujuan.....	44
4.2. Sasaran.....	44
Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan	
5.1. Strategi.....	49
5.2. Arah Kebijakan.....	49
Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	53
Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	61
Bab VIII. Penutup.....	63

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas Izin dan Ridhonya jualah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 – 2026 ini dapat dibuat dan diselesaikan.

Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2021-2026

RENSTRA ini nantinya digunakan sebagai acuan menyusun Rencana Kerja (Renja) dan selanjutnya pada akhir tahun akan dievaluasi dan dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Demikian RENSTRA ini disusun, untuk menjadi acuan dan pedoman seluruh aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugasnya.



Jepok Basung, November 2021

HERIZON, ST

NIP : 19690727 199803 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka menengah (lima tahun) hingga perencanaan jangka pendek (tahunan) yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai sasaran atau cita-cita yang dilengkapi dengan strategi dan cara pencapaiannya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sebagai petunjuk pelaksanaannya, diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016, tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Agam Nomor 51 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Pimpinan OPD bersama pejabat dibawahnya dan staf, harus merumuskan rencana strategis organisasinya untuk mewujudkan kesinambungan perencanaan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk 2021-2026.

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dimana penyusunannya diselaraskan dengan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rencana strategis ini disusun memperhatikan isu-isu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Analisa Kajian Resiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Agam,

mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal.

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan renstra ini.

Selain itu penyusunan dokumen Renstra ini juga memperhatikan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Barat dan Rencana Strategis Kementerian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 tahun 2016, tentang Perubahan Organisasi Perangkat;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stándar Pelayanan Minimal
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Peraturan Bupati Agam Nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Ini merupakan awal dari proses akuntabilitas organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dalam penyusunannya melibatkan unsur internal baik pegawai maupun jajaran pimpinan, serta memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain yang terkait (*stakeholders*) mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah untuk:

- a. Memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai tindakan-tindakan dan pemikiran strategis organisasi serta lebih mengarahkan aktivitas organisasi kepada tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta strategi-strategi yang akan digunakan untuk mencapainya.
- b. Menjadi acuan dan bahan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (*operational plan*).
- c. Menjadi acuan dan bahan dalam penyusunan rencana kinerja (*Performance plan*),
- d. Menjadi acuan dan bahan dalam pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan.
- e. Menjadi acuan dan bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , sebagai berikut

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Memuat informasi tentang peran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas ini

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada bab ini menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, Telaah renstra K/L, Telaahan RTRW dan Kajian

lingkungan hidup strategis dan Penentuan Isu-Isu strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN AGAM

2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Agam Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan Teknis sesuai kewenangan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 51 Tahun 2016 dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
 - a. Kasi Seksi Irigasi dan Pengelolaan Tata Guna Air
 - b. Seksi Sungai Danau Pantai dan Rawa
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Air

4. Kepala Bidang Bina Marga
 - a. Seksi Pembangunan Jalan
 - b. Seksi Pembangunan Jembatan
 - c. Seksi Peralatan dan Labor

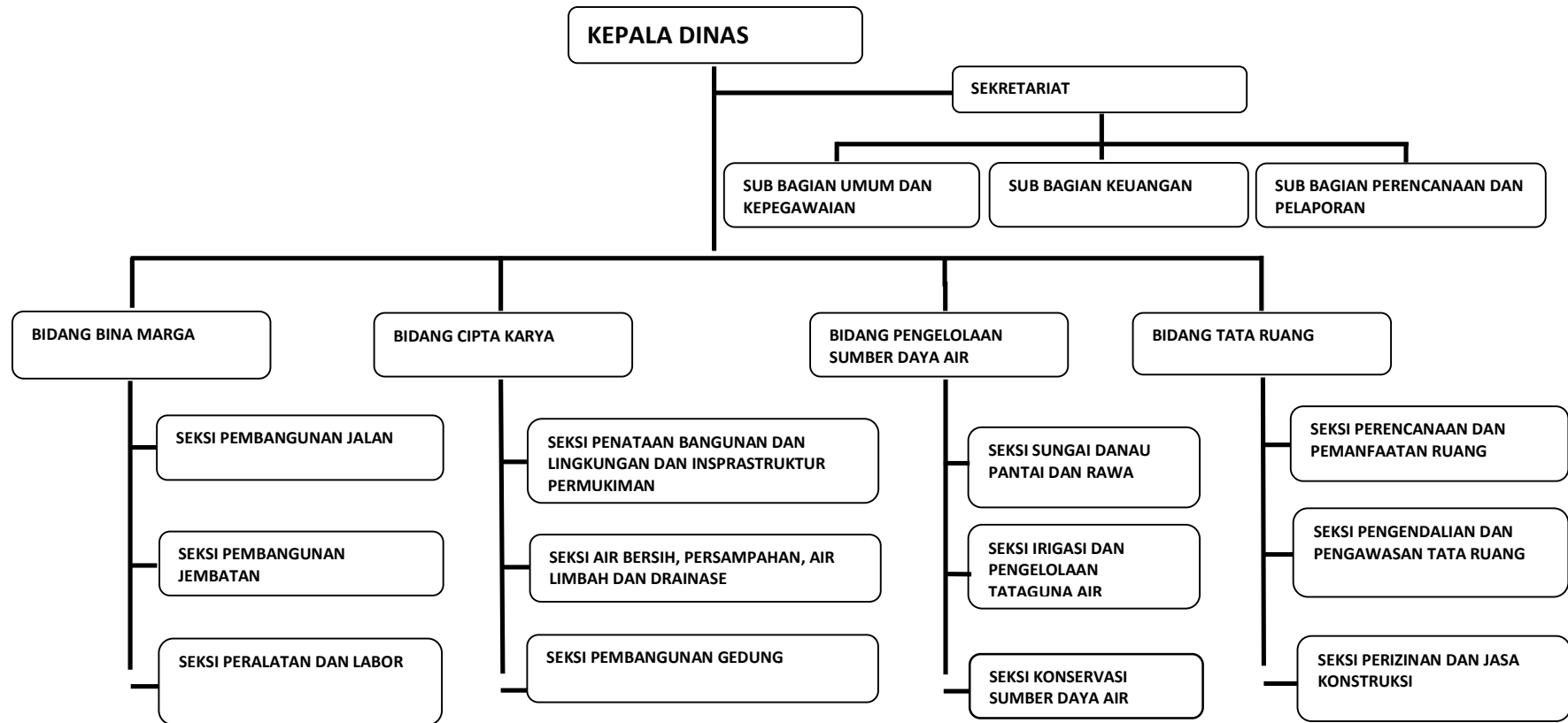
5. Kepala Bidang Pemukiman Perumahan
 - a. Seksi Penataan Bangunan, Lingkungan dan Infrastruktur Permukiman
 - b. Seksi Air Bersih, Persampahan, Air Limbah dan Drainase
 - c. Seksi Pembangunan Gedung.

6. Kepala Bidang Tata Ruang
 - a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Perizinan dan Jasa Konstruksi.

Struktur Organisasi tersebut telah memenuhi kaedah organisasi yang baik, dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang memadai dan dilengkapi Urusan tugas jabatan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Agam sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN AGAM**



2.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan pelaporan. Dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Fungsi

1. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian
2. Pelaksanaan urusan keuangan
3. Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub bagian Keuangan.
3. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

Masing – masing Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas :

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumahtangga, kerjasama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta kepegawaian
2. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas jangka panjang dan proposal pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan pekerjaan umum dan tata ruang sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan.

2. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang bina marga dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Fungsi :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan;
2. Pembinaan dan pengawasan pengendalian kegiatan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi pengembangan jalan dan jembatan;
3. Pembinaan dan pengawasan pengendalian serta pengawasan pembangunan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. Pembinaan pengelolaan administrasi teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan dan peningkatan rehabilitasi sarana jalan dan jembatan;
6. Perumusan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan jalan dan jembatan;
7. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
8. Pembinaan, bantuanteknis, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
9. Pelaksanaan analisis, evaluasi, pembangunan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
10. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan jalan dan jembatan sesuai dengan rencana kerja dinas;
11. Penyusunan rencana, pengawasan, pengendalian perizinan utilitas pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari;

- a. Seksi Pembangunan Jalan;
- b. Seksi Pembangunan Jembatan; dan
- c. Seksi Peralatan dan Labor.

Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Tugas :

1. Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pembangunan jalan;
 - a. Melaksanakan pengaturan jalan kabupaten;
 - b. Melakukan pembinaan jalan kabupaten
 - c. Melaksanakan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk kabupaten
 - d. Melaksanakan pembangunan jalan kabupaten
 - e. Melaksanakan pengawasan jalan kabupaten
 - f. Menyusun pedoman teknis pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi pemeliharaan jalan.
 - g. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pemeliharaan jalan
 - h. Melaksanakan diseminasi dan penerapan system manajemen mutu serta pengawasan kegiatan rehabilitasi pemeliharaan jalan;
 - i. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan;
 - j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi pemeliharaan jalan.
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi sarana dan prasarana pemeliharaan jalan;
 - l. Melaksanakan survey struktur, analisis, penelitian seta melakukan rencana dan gambar pemeliharaan jalan, drainase dan penahan badan jalan;
 - m. Melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya pemeliharaan jalan, drainase dan penahan badan jalan;
2. Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pembangunan jembatan;
 - a. Melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan pembangunan jembatan kabupaten/ nagari berdasarkan kebijakan nasional di bidang pembangunan jembatan dengan memperhatikan keserasian antar daerah kawasan.
 - b. Melaksanakan pengembangan teknologi terapan di bidang jembatan.

- c. Melaksanakan pemberian pembiayaan pembangunan jembatan.
 - d. Melaksanakan pengrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jembatan kabupaten/ nagari;
 - e. Menyusun pedoman teknis pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi pemeliharaan jembatan;
 - f. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pemeliharaan jembatan;
 - g. Melaksanakan diseminasi dan penerapan system manajemen mutu serta pengawasan kegiatan rehabilitasi pemeliharaan jembatan;
 - h. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan;
 - i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi pemeliharaan jembatan;
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi sarana dan prasarana pemeliharaan jembatan;
 - k. Melaksanakan survey struktur, analisis, penelitian serta melakukan rencana dan gambar pemeliharaan jembatan;
 - l. Melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya pemeliharaan jembatan;
3. Seksi Peralatan dan Labor mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pemeliharaan peralatan, pelaksanaan pengelolaan peralatan jalan dan jembatan, serta pelaksanaan pengujian dan pengendalian terhadap mutu (material);
- a. Menyusun pedoman teknis pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi pemeliharaan jalan dan jembatan.
 - b. Melaksanakan diseminasi dan penerapan sistem manajemen mutu serta pengawasan kegiatan.
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peralatan (Alatberat);
 - d. Melaksanakan pengujian dan pengendalian terhadap standar mutu (material); dan

3. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan sumber daya air dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang irigasi dan pengelolaan tata guna air, sungai, danau, pantai dan rawa, konservasi sumber air;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang irigasi dan pengelolaan tata guna air, sungai, danau, pantai dan rawa, konservasi sumber air;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang irigasi dan pengelolaan tata guna air, sungai, danau, pantai dan rawa, konservasi sumber air; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:

1. Seksi Irigasi dan Pengelolaan Tata Guna Air
2. Seksi Sungai Danau Pantai dan Rawa
3. Seksi Konservasi Sumber Daya Air

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)

Tugas:

1. Seksi Irigasi dan Pengelolaan Tata Guna Air, mempunyai tugas menyelenggarakan program urusan pembangunan peningkatan rehabilitasi jaringan irigasi dan pelaksanaan pengembangan serta pengendalian penataan ruang irigasi dengan uraian tugas;
 - a. Melaksanakan pembentukan komisi irigasi
 - b. Melaksanakan penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan penguasaan air tanah
 - c. Melaksanakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.

- d. Melaksanakan penyelenggaraan sistim informasi sumber daya air dan / atau pada wilayah sungai dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

2. Seksi Sungai Danau Pantai dan Rawa mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan dalam rangka konservasi sumber daya air dengan uraian tugas :

- a. Melaksanakan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air.
- b. Melaksanakan penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
- c. Melaksanakan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
- d. Melaksanakan penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai
- e. Melaksanakan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air pada wilayah sungai
- f. Melaksanakan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

4. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang tata ruang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penataan, pemanfaatan penataan ruang, pengendalian, dan pengawasan penataan ruang dan bangunan.
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan, penataan, pemanfaatan penataanr uang, pengendalian, dan pengawasan penataan ruang dan bangunan.
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penataan, pemanfaatan penataan ruang, pengendalian, pengawasan penataan ruang dan bangunan; dan
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari;

- 1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang;

2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
3. Seksi Perizinan dan Jasa Konstruksi.

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang

1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan program penataan ruang dan pemanfaatan ruang dengan uraian tugas;
 - a. Melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten
 - b. Melaksanakan peraturand aerah mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Nilai Standar Pokok Kegiatan.
 - c. Melaksanakan fasilitas peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
 - d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan.
 - e. Melaksanakan penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang.
 - f. Melaksanakan penetapan kawasan strategis.
 - g. Melaksanakan sosialisasi nilai StandarPokok kegiatan bidang penataan ruang.
 - h. Melaksanakan pengembangan sistim informasi dan komunikasi penataan ruang.
 - i. Melaksanakan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
 - j. Melaksanakan perencanaan tata ruang
 - k. Melaksanakan pemanfaatan ruang dan
2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan program pengendalian dan pengawasan perizinan pemanfaatan ruang dengan uraian tugas ;
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan pedesaan.

- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan nilai standar pokok kegiatan.
 - c. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan.
 - d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan bangunan gedung dan lingkungan.
 - e. Melaksanakan pengawasan tata lingkungan.
 - f. Melaksanakan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - g. Melaksanakan penetapan izin lokasi Kasiba/ Lisiba
 - h. Melaksanakan penetapan peraturan daerah mengenai bangunan gedung dan rumah Negara yang menjadi asset pemerintah dan
3. Seksi Perizinan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan program Bangunan Gedung dan Jasa konstruksi serta pengelolaan izin mendirikan bangunan dan izin Usaha Jasa Konstruksi serta mengoordinasikan sumber-sumber pendapatan di bidang penataan ruang dengan uraian tugas;
- a. Melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat dalam hal perizinan dan penyelenggaraan jasa konstruksi
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pedoman standar teknis dalam pengelolaan perizinan dan jasa konstruksi.
 - c. Melaksanakan penyusunan dan penetapan kelembagaan pelayanan perizinan (IMB) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
 - d. Menyusun standar minimal dalam pelayanan perizinan.
 - e. Melakukan pendataan bangunan yang telah memiliki IMB
 - f. Melaksanakan penyelenggaraan IMB Gedung
 - g. Melaksanakan penerbitan rekomendasi perizinan usaha jasa konstruksi.
 - h. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
 - i. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan bahan pedoman dan petunjuk teknis bidang cipta karya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Fungsi :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana keciptakarya.
2. Pembinaan, dan pengawasan pengendalian kegiatan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi pengembangan keciptakarya.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan dan peningkatan rehabilitasi sarana keciptakarya.
4. Perumusan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan keciptakarya.
5. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bidang keciptakarya
6. Pelaksanaan analisis, evaluasi, pembangunan, dan pemeliharaan bangunan keciptakarya.
7. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur bidang cipta karya sesuai dengan rencana kerja dinas; dan

Bidang Cipta Karya membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari;

1. Seksi Penataan Bangunan, Lingkungan dan Infrastruktur Permukiman;
2. Seksi Air Bersih, Persampahan, Air Limbah dan Drainase; dan
3. Seksi Pembangunan Gedung

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya

1. Seksi Penataan Bangunan, Lingkungan dan Infrastruktur Permukiman menyelenggarakan program penataan bangunan, Lingkungan dan Infrastruktur Permukiman dengan uraian tugas;
 - a. Melakukan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

- b. Melaksanakan pemberdayaan kepadamasyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungannya.
 - c. Melaksanakan penyusunan perencanaan tata bangunan dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 - d. Melaksanakan penetapan status kawasan dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala local.
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penataan bangunan dan lingkungannya.
 - f. Melaksanakan pengawasan dan penertipan pelestarian bangunan dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskalalokal.
 - g. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan tata bangunan dan lingkungan; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
2. Seksi Air Bersih, Persampahan, Air Limbah dan Drainase mempunyai tugas menyelenggarakan program penyediaan sarana dan prasarana Air bersih, Persampahan, Air Limbah dan Drainase, dengan uraian tugas;
- a. Melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana pengembangan pengelolaan air bersih, persampahan, air limbah dan drainase;
 - b. Melaksanakan fasilitas penetapan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) sebagai penyelenggara sistim penyediaan air minum(SPAM);
 - c. Melaksanakan penetapan peraturan daerah nilai standar pokok kegiatan pelayanan prasarana dan sarana air minum berdasarkan standar prosudur manual yang disusun pemerintah dan provinsi;
 - d. Melaksanakan pemberian izin penyelenggaraan pengembangan SPAM;
 - e. Melaksanakan penyelesaian masalah dan permasalahannya;
 - f. Melaksanakan penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM;
 - g. Melaksanakan pengembangan SPAM untuk pemenuhan standar prosedur manual;
 - h. Melaksanakan fasilitas penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada Kecamatan, pemerintah nagari, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;
 - i. Melakukan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi;

- j. Melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air;
 - k. Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan system penyediaan air minum;
 - l. Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya;
 - m. Melaksanakan penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - n. Melaksanakan penetapan peraturan daerah nilai standar prosudur manual yang disusun pemerintah pusat dan provinsi;
 - o. Melaksanakan peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematasan genagan;
 - p. Melaksanakan penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistim drainase dan penanggulangan banjir serta koordinasi dengan daerah sekitar;
 - q. Melaksanakan penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase.
 - r. Melaksanakan penyusunan rencana induk prasarana dan sarana drainase;
 - s. Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan system drainase dan pengendali banjir;
 - t. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan nilai standar pokok kegiatan; dan
 - u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
3. Seksi Pembangunan Gedung mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan gedung pemerintah, dengan uraian tugas :
- a. Melaksanakan pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan dan program seksi pembangunan gedung;
 - b. Melaksanakan pengumpulan dan menganalisa peraturan perundang-undangan pembangunan gedung;
 - c. Melaksanakan penyiapanbahan tentang pelaksanaan perencanaan dan program bidang pembangunan gedung;
 - d. Melaksanakan pembuatan rencana dan program kerja seksi Pembangunan gedung;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung;

- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi pembangunan gedung;
- g. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi pembangunan gedung;
- i. Melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat dalam perencanaan bangunan gedung dan lingkungannya;
- j. Melaksanakan perencanaan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- k. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara yang menjadi asset pemerintah;
- l. Melaksanakan penetapan status bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan yang berskalalokal;
- m. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam perencanaan bangunan gedung dan lingkungannya;
- n. Melaksanakan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung;
- o. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan bangunan gedung dan lingkungan;
- p. Melaksanakan pendataan bangunan gedung; dan
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sampai saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut ;

2.2.1. Sumber daya manusia

Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sampai saat ini berjumlah 115 orang terdiri dari 68 orang ASN, 30 orang pegawai tidak tetap (PTT) dan 27 orang tenaga harian lepas (THL).

Adapun rinciannya sebagai berikut :

pejabat eselon II : 1 orang
 pejabat eselon III.a : 1 orang
 pejabat eselon III.b : 4 orang
 pejabat eselon IV : 14 orang
 pelaksana : 48 orang
 pegawai tidak tetap : 20 orang
 tenaga harian lepas : 27 orang

**TABEL SUMBER DAYA MANUSIA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN AGAM**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	BIDANG	JENIS KELAMIN
1	OFRIZON, ST 19690727 199803 1 004	IV/A	KEPALA DINAS / SEKRETARIAT	LAKI-LAKI
2	RUDI HARISON, ST.MSI 19720901 199903 1 004	IV/B	SEKRETARIS / SEKRETARIAT	LAKI-LAKI
3	HERMON TRIYOGA,SST 19730722 199803 1 004	IV/A	KEPALA BIDANG BINA MARGA	LAKI-LAKI
4	WIDODO BUDIAYANTO,ST 19750313 200901 1 004	III/C	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA	LAKI-LAKI
5	GANI BASYA,ST.MT 19800518 201001 1 012	III/D	KEPALA BIDANG TATA RUANG	LAKI-LAKI
6	MULYADI, ST 19820507 201001 1 022	III/C	TATA RUANG	LAKI-LAKI
7	DENA FITA,ST 19811111 201001 2 019	III/D	TATA RUANG	PEREMPUAN
8	DODA AGMI,S.SOS 19720502 200701 1 007	III/D	TATA RUANG	LAKI-LAKI
9	RAHMAD AMIN,ST 19670602 199803 1 003	III/D	PSDA	LAKI-LAKI
10	MASNAL,ST 19701115 200604 1 008	III/C	PSDA	LAKI-LAKI
11	ALI AMRAN, ST 19730717 200701 1 005	III/B	PSDA	LAKI-LAKI
12	YUSDI GAFAR,SST 19670601 199803 1003	III/D	CIPTA KARYA	LAKI-LAKI

13	DODI GUSMAN, ST 19880620 201503 1 003	III/B	CIPTA KARYA	LAKI-LAKI
14	SYAHRI ALI DONI, ST 19850923 201503 1 001	III/B	CIPTA KARYA	LAKI-LAKI
15	IRWAN,ST.M.CIO 19750226 200501 1 006	III/D	BINA MARGA	LAKI-LAKI
16	ERFENDI 19670719 198910 1 001	III/C	BINA MARGA	LAKI-LAKI
17	ARNOLD AGUSTA, ST 19900818 201503 1 002	III/B	BINA MARGA	LAKI-LAKI
18	DOLA MAILANI, S.IP 197605062009012002	III/B	SEKRETARIAT	PEREMPUAN
19	EPIDEL, ST 197009032006041003	III/C	SEKRETARIAT	LAKI-LAKI
20	TETTY DESMAYENTI, ST 19770509 200604 2 012	III/C	SEKRETARIAT	PEREMPUAN
21	RAFIKA NOFRITA, SE 19821126 200701 2 002	III/B	SEKRETARIAT	PEREMPUAN
22	ALI MUNIR 19651231 200604 1 067	II/ D	SEKRETARIAT	LAKI-LAKI
23	RINI FITRIA 19780930 200701 2 002	II/ D	SEKRETARIAT	PEREMPUAN
24	RENIZA, S.SOS 19660503 198703 2 004	III/C	BINA MARGA	PEREMPUAN
25	ANTONI MAULANA.ST 19770204 200212 1005	III/B	BINA MARGA	LAKI-LAKI
26	AHMAD HUSNI NURDIN, ST 19891029 201503 1 001	III/B	BINA MARGA	LAKI-LAKI
27	YUSRA LINDA FEBRIANTI, ST 19890204 201902 2 003	III/A	BINA MARGA	PEREMPUAN
28	PUTRA RAMADHANA CATRI, ST 19930315 201902 1 003	III/A	BINA MARGA	LAKI-LAKI
29	ARIEF ADRIAN, ST 19900424 201902 1 002	III/A	BINA MARGA	LAKI-LAKI
30	YASMANTO 19760421 200801 1 003	II/C	BINA MARGA	LAKI-LAKI
31	SYAFRIZAL 19660120 200701 1 004	II/ D	BINA MARGA	LAKI-LAKI
32	EMRITAS 19681001 200604 1 006	II/B	BINA MARGA	LAKI-LAKI
33	SUARDI 19750519 200701 1 002	I/C	BINA MARGA	LAKI-LAKI
34	TETI PIPIANTI 19641231 198703 2067	III/B	SEKRETARIAT	PEREMPUAN
35	DASMAWATI 19701026 200604 2 002	II/ D	CIPTA KARYA	PEREMPUAN

36	DENI INDRAWAN 19840201 200901 1 005	II/C	CIPTA KARYA	LAKI-LAKI
37	HARAHAP 19640430 200604 1 001	I/D	CIPTA KARYA	LAKI-LAKI
38	ARIANDI 19810714 201001 1 029	II/B	CIPTA KARYA	LAKI-LAKI
39	SYAIFUL 19631109 200701 1 001	I/D	CIPTA KARYA	LAKI-LAKI
40	TATI DESWITA, ST 19821220 201503 2 001	III/B	CIPTA KARYA	PEREMPUAN
41	RINA ELYUNUSIYA, ST 19800420 201503 2 001	III/B	CIPTA KARYA	PEREMPUAN
42	RAIDA HAYATI, ST 19870413 201902 2 003	III/A	CIPTA KARYA	PEREMPUAN
43	FITRI WULANDARI, ST 19941113 201902 2 002	III/A	CIPTA KARYA	PEREMPUAN
44	ELIZA 19821028 201001 2 005	II/C	TATA RUANG	PEREMPUAN
45	DEKI SYUKRI, ST 19710605 200604 1 009	III/B	PSDA	LAKI-LAKI
46	YANDRI ANTONI,ST 19740118 200701 1 003	III/C	PSDA	LAKI-LAKI
47	WANDRIZAL, ST 19740424 200701 1 008	III/B	PSDA	LAKI-LAKI
48	WAWAN KURNIAWAN, ST 19820111 200604 1 009	III/B	PSDA	LAKI-LAKI
49	IRWAN, ST 19720223 200701 1 003	III/B	PSDA	LAKI-LAKI
50	AMRIZAL,ST 19700312 200604 1 005	III/B	PSDA	LAKI-LAKI
51	MARITIM 19681105 200604 1 003	II/ D	PSDA	LAKI-LAKI
52	ZULKIFLI 19690727 200604 1 004	II/ D	PSDA	LAKI-LAKI
53	ALWANDRI 19720607 200701 1 012	II/ D	PSDA	LAKI-LAKI
54	ARMEINDRA 19740113 200701 1 006	II/ D	PSDA	LAKI-LAKI
55	MASRIZAL 19720326 200701 1 008	II/ D	PSDA	LAKI-LAKI
56	SISWANTO WIBOWO 19820913 200701 1 003	II/ D	PSDA	LAKI-LAKI
57	SUMARDIANTO 19720110 200604 1 010	II/C	PSDA	LAKI-LAKI
58	ERIZALDI 19760815 200701 1 004	II/B	PSDA	LAKI-LAKI
59	NASWAR WARTA TULEN 19780616 200701 1 005	II/B	PSDA	LAKI-LAKI

60	HOLIDIN KUSWARA 19790216 200701 1 002	II/B	PSDA	LAKI-LAKI
61	ZUHARMEN 19701115 200604 1 009	II/A	PSDA	LAKI-LAKI
62	IRMAN 19691201 200604 1 005	II/A	PSDA	LAKI-LAKI
63	JON ANDRI 19751225 200701 1 004	II/A	PSDA	LAKI-LAKI
64	SYAMSIR 19700606 200604 1 003	I/D	PSDA	LAKI-LAKI
65	ERIYANTO 19741210 200701 1 027	I/D	PSDA	LAKI-LAKI
66	AHMAD NAZIRWAN 19760828 200701 1 002	I/D	PSDA	LAKI-LAKI
67	ERI FAUZI 19660803 200604 1 005	I/D	PSDA	LAKI-LAKI
68	ERMAN 19690101 200604 1 009	I/C	PSDA	LAKI-LAKI
69	MUSLIKH IHSANI	PTT	SEKRETARIAT	LAKI-LAKI
70	ZULFA, S.IP	PTT	SEKRETARIAT	PEREMPUAN
71	YESI YONG SEPTI, A.Md	PTT	SEKRETARIAT	PEREMPUAN
72	DARWILIS	PTT	SEKRETARIAT	LAKI-LAKI
73	BASRIZAL	PTT	SEKRETARIAT	LAKI-LAKI
74	SYAMSUDIN	PTT	SEKRETARIAT	LAKI-LAKI
75	ELDA YANTI, SH	PTT	SEKRETARIAT	PEREMPUAN
76	DIAN SURYA KUSNANDA, SH	PTT	SEKRETARIAT	LAKI-LAKI
77	IZELMAN	PTT	SEKRETARIAT	LAKI-LAKI
78	ISMANISWATI, SE	PTT	BINA MARGA	PEREMPUAN
79	SEPRA INDRA KUSNADI	PTT	BINA MARGA	LAKI-LAKI
80	YURNALIS	PTT	BINA MARGA	LAKI-LAKI
81	SONYA ARDI, A.Md	PTT	CIPTA KARYA	PEREMPUAN
82	EDWAR, SE	PTT	CIPTA KARYA	LAKI-LAKI
83	MIRA ZULAIDA	PTT	PSDA	PEREMPUAN
84	AMRIZAL	PTT	PSDA	LAKI-LAKI
85	JUWIRMAN	PTT	PSDA	LAKI-LAKI
86	ROBI ALNEDI, SE	PTT	PSDA	LAKI-LAKI
87	LESMIDA	PTT	PSDA	PEREMPUAN
88	GRAFTOSIS	PTT	TATA RUANG	PEREMPUAN
89	DONI EKA PUTRA	THL	SEKRETARIAT	LAKI-LAKI
90	RINDO MULYADI	THL	SEKRETARIAT	LAKI-LAKI
91	ULFA MAIDA	THL	SEKRETARIAT	PEREMPUAN
92	DEWI SUSILAWATI	THL	SEKRETARIAT	PEREMPUAN
93	DESRA OKI ANIS	THL	SEKRETARIAT	LAKI-LAKI
94	RIKI NALDO	THL	SEKRETARIAT	LAKI-LAKI
95	MILA OKNETTI	THL	SEKRETARIAT	PEREMPUAN
96	SUSI ANDRIANI	THL	SEKRETARIAT	PEREMPUAN
97	FEBI GIA ELANDA	THL	SEKRETARIAT	PEREMPUAN

98	SYAFRIZAL	THL	SEKRETARIAT	LAKI-LAKI
99	NELVIA MURTI	THL	BINA MARGA	PEREMPUAN
100	RAHMALIZA, S.Kom	THL	BINA MARGA	PEREMPUAN
101	A. RAMLI	THL	BINA MARGA	LAKI-LAKI
102	SRI MURNI	THL	CIPTA KARYA	PEREMPUAN
103	DELVA YUWANDA	THL	CIPTA KARYA	LAKI-LAKI
104	DESI SUSANTI	THL	CIPTA KARYA	PEREMPUAN
105	HENDRI	THL	CIPTA KARYA	LAKI-LAKI
106	ANDUSMIKO	THL	CIPTA KARYA	LAKI-LAKI
107	LISNA DYAWATI	THL	PSDA	PEREMPUAN
108	TIARA ELMAZONIKA	THL	PSDA	PEREMPUAN
109	MAYANG SARI	THL	PSDA	PEREMPUAN
110	BENNY ELFIKA	THL	PSDA	LAKI-LAKI
111	WELZA PUTRA	THL	PSDA	LAKI-LAKI
112	AHMAD FANDI	THL	PSDA	LAKI-LAKI
113	ALI AZHAR	THL	PSDA	LAKI-LAKI
114	ARIS KURNIAWAN	THL	PSDA	LAKI-LAKI
115	ZULHENDRA	THL	PSDA	LAKI-LAKI

2.2.2. Sarana Gedung

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang saat ini mempunyai gedung dengan ukuran 12 x 30 M dua lantai ditambah bangunan Arsip dan Ruang Rapat dengan ukuran 6 x 20 M dua lantai yang terletak di jalan Koto Padang baru Lubuk Basung

2.2.3. Sarana Perlengkapan Kantor

Sampai dengan November 2021 jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai berikut :

Proyektor + Attachment	: 4 unit
Printer	: 55 unit
Komputer	: 37 unit
Meja biro	: 21 unit
Meja ½ Biro	: 98 Unit
Laptop	: 25 unit
Kursi putar eksklusif	: 34 unit
Mesin tik	: 3 buah
Camera digital	: 3 buah
Infocus dan layar	: 4 unit
Meja Rapat	: 4 Unit
Meja computer	: 7 buah

Lemari arsip	: 6 buah
Lemari Kayu	: 53 Buah
Filling cabinet	: 38 unit
White Board	: 4 Unit
Kursi Tamu	: 10 Unit
Kursi Putar	: 27 Unit
Kursi biasa	: 98 Unit
Sound System	: 1 buah
Speaker Aktif	: 2 Buah
Tv	: 3 buah
AC	: 23 buah
Kipas angin	: 2 Buah
Mesin absensi	: 5 buah
CCTV	: 1 Unit
UninterruptiblePowerSupply	: 6 Unit
Generator Set	: 2 Unit
Tabung Pemadam Kebakaran	: 11 Unit

2.2.4. Alat Transportasi

Untuk menunjang kelancaran operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, memiliki kendaraan

Operasional dinas terdiri dari :

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| a. Kendaraan roda empat Mini Bus | : 4 unit |
| b. Kendaraan roda dua | : 3 unit |
| c. Pick Up | : 2 Unit |
| d. Tronton | : 1 Unit |
| e. Dam Truk | : 2 Unit |
| d. Mobil Tinja (Hibah Kemen.PUPR) | : 1 Unit |

2.2.5. Alat Berat

- | | |
|------------------------------|----------|
| a. Excavator | : 2 Unit |
| b. Wheel Loader + Attachment | : 1 Unit |
| c. Mesin Gilas | : 1 Unit |

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jenis Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, mencakup pelayanan langsung dan pelayanan secara tidak langsung. Bentuk Pelayanan langsung antara lain meliputi :

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran, merupakan kegiatan rutin intern Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berhubungan langsung dengan aktifitas serta peningkatan mutu kualitas aparatur pemerintahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Mencakup penyediaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran;
- b. Pelayanan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (Advice Planning), yaitu pelayanan terhadap rencana kabupaten yang berlaku pada lokasi yang direncanakan akan dibangun. Advice Planning merupakan salah satu instrument pengendalian pemanfaatan ruang agar pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat maupun dunia usaha sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah disusun. Adapun tujuannya adalah mengendalikan pembangunan disuatu kawasan untuk menciptakan kawasan yang tertata, indah dan nyaman serta produktif.
- c. Pemberian Rekomendasi kesesuaian tata ruang adalah memberikan rekomendasi terhadap permohonan untuk menggunakan ruang yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah di atur dalam aturan Rencana Tata Ruang
- d. Pelayanan Pembangunan Infrastruktur, merupakan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berkenaan dengan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien. Mencakup pelayanan pembangunan gedung dan sarana penunjangnya, pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan jaringan irigasi dan drainase perkotaan, pelayanan cakupan air bersih, pelayanan pembinaan kepada pihak ketiga (konsultan dan kontraktor pelaksana pekerjaan);
- e. Pelayanan sosial masyarakat, merupakan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang menyelenggarakan pembangunan di bidang peningkatan fasilitas keagamaan.

Sedangkan pelayanan tidak langsung antara lain:

- a. Pelayanan perizinan IMB, yaitu Izin Mendirikan Bangunan merupakan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan Undang-undang Bangunan Gedung. Kemudian dengan adanya Dinas Perizinan, maka izin mendirikan bangunan menjadi salah satu yang menjadi tugas Dinas Perizinan. Keterkaitan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada saat ini adalah menerbitkan rekomendasi, sehingga secara teknis masih menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

- b. Pelayanan IUJK, yaitu Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan kepada perusahaan jasa konstruksi yang secara domisili berada pada wilayah administrasi Kabupaten Agam. Pelayanan IUJK sama halnya dengan pelayanan IMB yaitu melalui Dinas Perizinan. Pada saat ini keterkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah memberikan rekomendasi, sehingga secara teknis masih menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- c. Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk kepentingan publik dan perubahan terhadap alat alat kelengkapan jalan
- d. Pemberian izin untuk menggunakan kekayaan daerah dalam hal ini penggunaan alat alat berat yang menjadi asset Dinas PUTR.

Terhadap kinerja pelayanan, berikut ini disampaikan kinerja selama 5 tahun berturut-turut, dimana secara umum kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang cukup memuaskan dimana pelayan berbagai pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun diatas 100 %.

Untuk lebih jelasnya kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dari tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Agam

No.	Indikator Kinerja	Target	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PU	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
2	Terlaksananya pembangunan gedung/kantor baru	-	-	-	3 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1 Unit	1 Unit	1.00 Unit	3 Unit	4 Unit	7 %	14 %	14 %	14 %	14 %
3	Terlaksananya pembuatan program perencanaan anggaran sesuai dengan rencana kerja SKPD sesuai dengan RPJM dan Renstra SKPD	-	-	-	3 Pkt	3 Pkt	3 Pkt	3 Pkt	3 Pkt	3 Pkt	3 Pkt	3 Pkt	3 Pkt	3 Pkt	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
4	terpeliharanya jalan dan jembatan kabupaten supaya tersedianya kondisi jalan dan jembatan yang mantap																		
	1. Pemeliharaan Jalan	-	-	-	150 Km	150 Km	150 Km	150 Km	150 Km	25 Km	27 Km	6 Km	17 Km	10 Km	17 %	18 %	4 %	11 %	7 %
	2. Pemeliharaan Jembatan	-	-	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	5 Unit	7 Unit	4 Unit	-	-	50 %	70.00 %	40 %	-	-
5	Terlaksananya peningkatan jalan dan jembatan																		
	1. Peningkatan Jalan	-	-	-	15 Km	15 Km	15 Km	15 Km	20 Km	75.4 Km	100.7 Km	60 Km	53.55 Km	31.1 Km	503 %	671 %	671 %	357 %	207 %
	2. Peningkatan Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bertambahnya panjang jalan dan jembatan baru																		
	1. Pembangunan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pembangunan Jembatan	-	-	-	5	5	5	5	5	6 unit	8 unit	6 unit	4 unit	1 unit	120 %	160 %	120 %	20 %	20 %
7	Tersedianya alat berat berkondisi baik dan siap pakai	-	-	-	1	1	1	1	2	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
8	terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi	-	-	-	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	40 Unit	34 Unit	31 Unit	24 Unit	2 Unit	500.00 %	425.00 %	387.50 %	300.00 %	25.00 %
9	jumlah pembangunan infrastruktur irigasi	-	-	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	31 Unit	57 Unit	13 Unit	11 Unit	10 Unit	620.00 %	1.140.00 %	260.00 %	220.00 %	200.00 %
10	Jumlah GP3A yang terbina	-	-	-	26	35	36	35	37	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Target	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Terlaksananya pembangunan infrastruktur kota dan pemukiman	-	-	-	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	5 Unit	17 Unit	391 Unit	455 Unit	489 Unit	10.00 %	34.00 %	782.00 %	910.00 %	978.00 %
12	Terlaksananya pembangunan infrastruktur pemukiman pedesaan	-	-	-	10 Kws	10 Kws	10 Kws	10 Kws	15 Kws	5 Kws	5 Kws	39 Kws	37 Kws	48 Kws	50.00 %	50.00 %	390.00 %	370.00 %	320.00 %
13	Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	-	-	-	30 Km	40 Km	41 Km	41 Km	36 Km	13 Km	16 Km	53 Km	43 Km	17 Km	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
14	terlaksananya program pembangunan infrastruktur masyarakat pedesaan dengan metoda pemberdayaan masyarakat	-	-	-	75 %	75 %	80 %	85 %	90 %	- %	- %	80 %	85 %	90 %	- %	- %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
15	Terlaksananya pembangunan sarana/prasarana air minum masyarakat	-	-	-	25000 M	40000 M	55000 M	55000 M	40000 M	424 KK	232 KK	231 KK	383 KK	797 KK	82.66 %	85.79 %	92.00 %	95.36 %	100.00 %
16	Terlaksananya pembangunan sarana/prasarana sanitasi pemukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tersedianya rencana tata ruang wilayah kabupaten Agam	-	-	-	1 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	1 Dok	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
18	Terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap perizinan IMB, retribusi galian C perpanjang IUJK, dan pelayanan advis plannina	-	-	-	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
19	Meningkatnya frekuensi pengambilan sampah di TPS dan meningkatnya volume sampah terangkut	-	-	-	2 1 Mg	1 2hari	1 2hari	1 2hari	1 2hari	2 2hari	1 2hari	1 2hari	1 2hari	1 2hari	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
20	Tertatanya RTH yang sudah diperuntukkan dalam RTRW	-	-	-	20 %	25 %	40 %	60 %	75 %	26 %	46 %	84 %	79 %	100 %	130.00 %	184.00 %	210.00 %	131.67 %	133.33 %

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Agam

No.	Uraian	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PU	1,275,990,500	1,607,002,565	1,880,081,673	1,921,902,631	2,300,488,739	96.34%	73.15%	96.32%	84.21%	84.27%	10,485,388,836	8,985,466,108
2	Terlaksananya pembangunan gedung/kantor baru	-	24.415.464.150	18.086.962.400	37.060.613.760	2.541.984.700	-	98.35%	16.03%	96.83%	98.15%	86.714.631.300	82.105.030.010
3	Terlaksananya pembuatan program perencanaan anggaran sesuai dengan rencana kerja SKPD sesuai dengan RPJM dan Renstra SKPD	21,540,000	54,485,500	27,973,000	39,979,000	43,276,000	99.72%	92.88%	31.78%	79.96%	58.09%	292,789,550	187,253,500
4	terpeliharanya jalan dan jembatan kabupaten supaya tersedianya kondisi jalan dan jembatan yang mantap												
	1. Pemeliharaan Jalan	14.439,122,840	16,516,525,850	3,215,524,400	10,074,278,709	6.175,647,619	97.40 %	96.67 %	97.86 %	99.96 %	87.70 %	7,373,121,500	6,599,536,900
	2. Pemeliharaan Jembatan	1.045,760,600	740,332,450	1,270,215,100	-	96,600,475	93.93 %	93.41 %	99.57 %	-	89.50 %	7,630,137,000	6,859,939,158
5	Terlaksananya peningkatan jalan dan jembatan												
	Peningkatan Jalan	57.692,852,400	94,983,952,010	77,360,281,345	81,729,885,648	19.822,414,250	81.66 %	98.42 %	98.59 %	99.51 %	99.99 %	7,373,121,500	6,599,536,900
	Peningkatan Jembatan												
6	Bertambahnya panjang jalan dan jembatan baru												
	1. Pembangunan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pembangunan Jembatan	4.682,153,450	10,574,527,800	6.165.407.300	4,015,392,950	3,573,866,585	97.57 %	93.41 %	92.81 %	99.91 %	99.94 %	18,396,414,400	15,330,654,170
7	Tersedianya alat berat berkondisi baik dan siap pakai	213,922,256	271,026,327	194,905,023	293.419.236	3.573.866.585	97.57 %	93.41 %	92.81 %	99.91 %	99.94 %	3,773,135,700	2,725,601,281
8	terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi	7.326.800.150,0	5.601.444.500,00	4.928.540.850,00	5.062.769.000,00	244.886.750,00	99.19%	99.89%	99.88%	87.51%	99.85%	24.003.248.000,00	23.164.441.250,00
9	jumlah pembangunan infrastruktur irigasi	10.473.867.874,0	24.499.254.629,0	9.927.131.900,00	7.607.950.000,00	6.299.091.903,00	99.75%	97.71%	98.59%	92.49%	96.73%	60.380.938.450,00	58.807.296.306,00
10	Jumlah GP3A yang terbina	-	-	-	483.867.135,00	-	-	-	-	-	-	535.692.000,00	483.867.135,00

No.	Uraian	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Terlaksananya pembangunan infrastruktur kota dan pemukiman	55,094,000	172,822,250	3,913,684,900	4,557,249,500	5,764,098,500	98.56%	71.88%	92.98%	99.96%	99.96%	14,830,438,500	14,462,949,150
12	Terlaksananya pembangunan infrastruktur pemukiman pedesaan	23,968,000	21,596,400	198,600,000	186,135,650	242,659,500	85.60%	75.49%	40.40%	63.05%	64.66%	1,218,709,000	672,959,550
13	Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	16.678.012.290	10.146.465.500	6.165.407.300	5.880.181.500	328.466.854	98.34%	79.09%	92.16%	99.13%	99.36%	42.740.758.500	39.198.536.444
14	terlaksananya program pembanguan infrastruktur masyarakat pedesaan dengan metoda pemberdayaan masyarakat	-	-	4,742,798,837	118,037,900	3,808,775,350	0.00%	0.00%	78.68%	51.94%	99.34%	10,089,266,000	8,669,612,087
15	Terlaksananya pembangunan Sarana/prasarana air minum masyarakat	4.318.374.150	4.033.536.500	5.222.619.500	8.277.973,150	3.572.255,721	97.47 %	98.58 %	94.44 %	99.26 %	85.34 %	26.578.196,,000	25.424.756,000
16	Terlaksananya pembangunan sarana/prasarana sanitasi pemukiman	297.965.250	-	60.073.000	503.375.250	336,309,000	89.75%	82.19%	84.80%	95.91%	91.41%	1,403,488,000	1,253,635,100
17	Tersedianya rencana tata ruang wilayah kabupaten Agam	247,786,800	111,613,500	315,720,000	143,412,900	12,131,550	94.00%	15.41%	62.73%	67.89%	91.04%	1,614,429,000	675,120,300
18	Terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap perizinan IMB, retribusi galian C perpanjang IUJK, dan pelayanan advis planning	434,907,700	386,898,150	180,886,500	148,306,680	135,438,900	87.00%	95.37%	88.35%	75.08%	68.34%	1,100,379,000	899,539,780
19	Meningkatnya frekuensi pengambilan sampah di TPS dan meningkatnya volume sampah terangkut	481,474,500	693,613,500	2,606,434,050	2,989,944,850	2,370,077,600	99.54%	99.89%	79.31%	75.32%	97.36%	10,868,426,000	9,141,544,500
20	Tertatanya RTH yang sudah diperuntukkan dalam RTRW	456,175,100	812,633,000	1,475,240,406	1,394,570,900	2,058,809,000	96.85%	94.79%	96.19%	97.74%	98.14%	6,386,631,100	6,197,428,406

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

1. Tantangan (Threat)

- a. Kondisi geografis dengan wilayah yang cukup luas, kawasan permukiman menyebar dengan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan umum masih rendah,
- b. Kondisi topografi daerah dengan terbentang dari dataran rendah hingga dataran tinggi, yang menyulitkan dalam penyediaan infrastruktur, serta sangat rentan terhadap kerusakan oleh alam.
- c. Merupakan kawasan dengan curah hujan tinggi dengan tingkat kejadian bencana alam yang cukup tinggi.
- d. Merupakan daerah dengan potensi ekonomi kedua terbesar di Provinsi Sumatera Barat.
- e. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan air bersih.
- f. Terbatasnya kemampuan daerah dalam penyediaan infrastruktur.
- g. Rendahnya cakupan layanan air bersih.
- h. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air di saluran irigasi
- i. Masih adanya perilaku usaha jasa konstruksi yang tidak mempedulikan kualitas konstruksi.
- j. Memiliki jalan kabupaten yang cukup panjang yakni \pm 1.694,63 km dari jumlah tersebut yang telah diaspal sepanjang 1.359,987 Km (80,25%). Dari panjang jalan yang telah diaspal hanya 722,69 km (42,65%) dalam kondisi baik.
- k. Memiliki kawasan irigasi yang cukup luas dengan jumlah 885 Daerah Irigasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 295 merupakan daerah irigasi kewenangan kabupaten dan sisanya sebanyak 590 irigasi merupakan irigasi desa, dari jumlah tersebut 82.70% dalam kondisi baik.
- l. Pengelolaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di pedesaan banyak mengalami hambatan dikarenakan sumber yang ada berada jauh dari lokasi permukiman.
- m. Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan khususnya untuk penduduk miskin.
- n. Masih adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih maupun karena kendala batas administrative wilayah
- o. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Hal ini disebabkan tidak tersampainya informasi tentang peraturan penataan ruang dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peruntukan sebagai dasar dalam pemanfaatan ruang.

2. Peluang (Opportunis)

- a. Tersedianya regulasi tentang penataan ruang.
- b. Tersedianya regulasi tentang kerja sama dengan kejaksaan, dalam rangka transparansi dan peningkatan kualitas infrastruktur.
- c. Adanya kepedulian masyarakat terhadap kualitas infrastruktur.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian (*sociocultural*) masyarakat yang tinggi dalam ikut menyediakan infrastruktur.
- e. Merupakan daerah tujuan wisata di Provinsi Sumatera Barat.
- f. Pemanfaatan dana alokasi nagari dalam ikut menyediakan dan memelihara infrastruktur.
- g. Komitmen pimpinan daerah yang fokus dalam penyediaan anggaran untuk pembangunan jalan dan irigasi.
- h. Merupakan sebagai daerah lumbung padi di Sumatera Barat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan

Pembangunan infrastruktur adalah bagian yang integral dari pembangunan nasional, karena ketersediaan infrastruktur yang memadai turut menentukan keberhasilan pembangunan pada sektor lainnya terutama pertumbuhan sektor ekonomi. Kegiatan pembangunan infrastruktur merupakan bagian terpenting dari pendukung seluruh sektor perekonomian secara umum. Pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak terhadap peningkatan aksesibilitas suatu daerah, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan produksi pertanian yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan seluruh potensi daerah Kabupaten Agam, Pemerintah Daerah terus berupaya menyediakan berbagai infrastruktur daerah guna menumbuhkembangkan seluruh sektor pembangunan. Karena pemerintah daerah berkeyakinan bahwa seluruh program pembangunan tidak dapat dicapai dengan maksimal apabila tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. Sehingga dengan tersedianya berbagai infratraktur pembangunan baik di nagari maupun di kawasan perkotaan LubukBasungdiharapkan seluruh sektor ekonomi dapat bergerak dan saling bersinergi sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.

A. Kondisi Umum Jaringan Jalan dan Jembatan

1. Jaringan Jalan

Sesuai dengan data dan inventarisasi jaringan jalan di Kabupaten Agam pada akhir tahun 2020, jumlah jaringan jalan terdiri dari ± 699 ruas jalan, dengan total panjang jalan ± 1.694,63Km. Penanganan jaringan atau jenis permukaan di Kabupaten Agam disesuaikan dengan kemampuan daerah meliputi:

Tabel 3.1. Panjang Jalan berdasarkan jenis Perkerasan

No.	Jenis Penanganan	Panjang
1.	Hotmix/Lapen/Macadam	928.459 Km

2.	Cor Beton	371.625Km
3.	Kerikil	243.392 Km
4.	Tanah	151.154 Km

Dilihat dari jenis kerusakan jaringan jalan di Kabupaten Agam dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2. Kondisi Jalan Berdasarkan kondisi Permukaan

No.	Kondisi Jalan	Panjang
1.	Kondisi Baik	1056.278 Km
2.	Kondisi Sedang	303.769 Km
3.	Kondisi Rusak Ringan	190.631 Km
4.	Kondisi Rusak Berat	143.952 Km

2. Jembatan

Berdasarkan data inventarisasi infrastruktur jembatan yang ada di Kabupaten Agam berjumlah ± 320Unit. Berdasarkan kondisi jembatan masih banyakjembatan yang perlu ditangani karena kondisi rusak, hal ini disebabkan oleh umur jembatan dan struktur jembatan yang banyak dibangun dengan menggunakan lantai kayu.

Tabel 3.3. Jumlah Jembatan Berdasarkan Kondisi Jembatan

No.	Kondisi Jembatan	Panjang
1.	Kondisi Baik	204 Unit
2.	KondisiSedang	70 Unit
3.	KondisiRusak	46Unit

3. Kerusakan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Kerusakan infrastrukturjalan dan jembatan disamping kerusakan yang dikarenakan oleh kehausan jalan karena umur pemakaian juga disebabkan oleh bencana alam seperti gempa, longsor maupun banjir.

a. Kerusakan Infrastruktur Jalan.

Kerusakan infrastruktur jalan di kabupaten Agam diantaranya kerusakan yang dikibatkan oleh:

- 1) Kerusakan ruas jalan yang dikarenakan kehausan akibat umur perkerasan yang sudah lebih dari 10 Tahun
- 2) Ruas Jalan yang rusak akibat tertimbun oleh longsor tebing.
- 3) Ruas jalan yang runtuh/terban akibat terbawa longsor
- 4) Perkerasan/Aspal yang retak-retak akibat gempa.
- 5) Kerusakan bangunan pelengkap jalan seperti drainase, dam penahan badan jalan dan penahan tebing dan lainnya.



b. Kerusakan Infrastruktur Jembatan

Kerusakan infrastruktur jembatan pada kabupaten agam diantaranya kerusakan yang diakibatkan oleh :

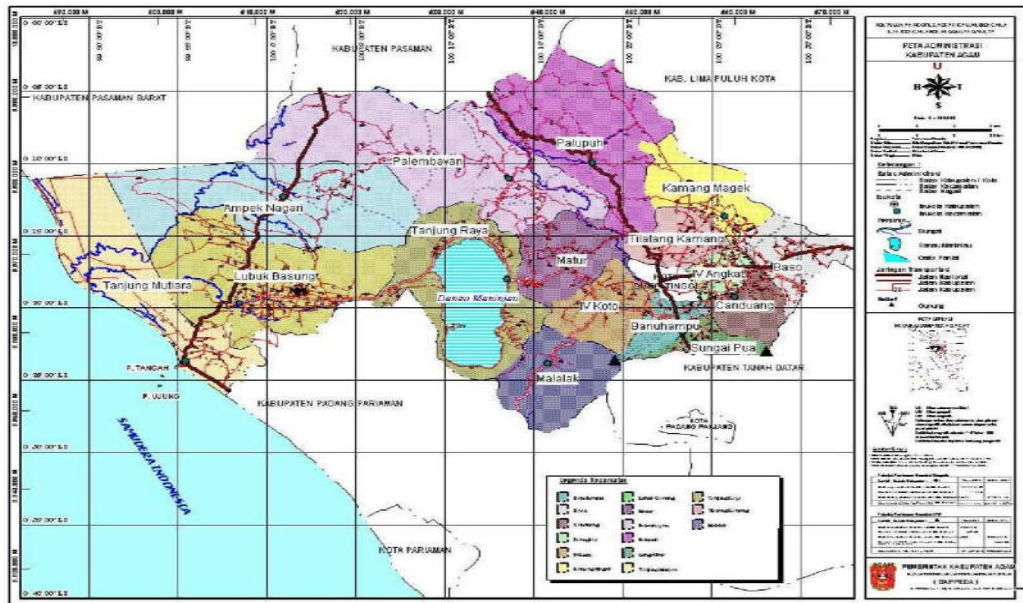
- 1) Jembatan hancur / hilang diterpa air bah bercampur bebatuan.
- 2) Abutmen jembatan miring dan bergeser sehingga gelagar dan lantai jembatan roboh.
- 3) Abutmen jembatan yang tergerus mengakibatkan jembatan miring.



Gambar 5 : Kondisi Kerusakan jembatan yang disebabkan bencana alam.

B. Kondisi Umum Jaringan Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pada Kabupaten Agam terdapat 295 buah Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Agam.



Gambar 6 : Peta Daerah Irigasi

Pengelolaan Irigasi dalam wilayah Kabupaten Agam dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam melalui Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Pada Bidang PSDA ini juga dibagi atas 4 wilayah kerja pada table berikut.

Tabel 3.4. Wilayah Kerja Bidang PSDA

No	Nama Wilayah	Kecamatan	Jumlah DI
1	Wilayah I	Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Tanjung Raya.	41
2	Wilayah II	Palembayan, IV Nagari	30
3	Wilayah III	Matur, IV Koto, Sei. Pua, Malalak.	29
4	Wilayah IV	Palupuh, Kameng Magek, Tilatang Kamang, Baso, IV Angkat, Canduang	55

Sumber. Bidang PSDA Dinas PUTR Kabupaten Agam

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam 2021 – 2026, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam kedudukannya berfungsi membantu Bupati di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terkait dengan **misi Pertama, Kedua, Ketiga dan keempat** Mewujudkan pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan mitigasi bencana.

RPJMD Kabupaten Agam 2016 – 2021

Misi 1	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani										
		Indikator		Kondisi Awal (2020)	Target						Akhir Periode
		Tujuan	Sasaran		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan 1 : Terwujudnya Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari Yang Efektif, Efisien dan Melayani		1.1. Indeks Reformasi Birokrasi.		C (48,16)	CC (51)	CC (55)	B (61)	B (66)	BB (71)	BB (76)	BB (76)
	Sasaran 1.1.1. Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel		1.1.1.1. Nilai SAKIP	B (65,51)	B (68)	BB (71)	BB (73)	BB (75)	BB (77)	BB (80)	BB (80)
			1.1.1.2. Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	N/A	sangat perlu perbaikan (65)	Perlu perbaikan (72)	Baik (78)	Baik (82)	Baik (84)	Baik (85)	Baik (85)
			1.1.1.3. Nilai EPPD	3,1281	3,1300	3,1350	3,1400	3,1450	3,1500	3,1550	3,1550
	Sasaran 1.1.2. Terselenggaranya birokrasi yang kapabel		1.1.2.1. Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	n/a	Tinggi (38)	Tinggi (40)	Tinggi (42)	Tinggi (44)	Tinggi (46)	Sangat tinggi (48)	Sangat tinggi (48)

			1.1.2.2. Indeks Profesionalitas ASN	53,96	53,96	55	58	62	66	70	70
			1.1.2.3. Indeks SPBE	cukup (2,11)	Cukup (2,5)	Baik (2,7)	Baik (2,9)	Baik (3,0)	Baik (3,1)	Baik (3,3)	Baik (3,3)
	Sasaran 1.1.3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		1.1.3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	82,87	83	83,5	84	84,5	85	85,5	85,5
		1.2. Tingkat Perkem- bangan Nagari		Berkem- bang	Berkem- bang	Berkem- bang	Berkem- bang	Cepat Berkem- bang	Cepat Berkem- bang	Cepat Berke- mbang	Cepat Berkem- bang
	Sasaran 1.2.1. Meningkatnya kinerja Pemerintahan Nagari		1.2.1.1. Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari	414,57	424	434	444	451	464	474	474
Misi 2	Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata.										
Tujuan	Sasaran	Indikator		Kondis i Awal (2020)	Target						
		Tujuan	Sasaran		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode
Tujuan 1. Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat		Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita. (ADHK)		-1,46	1,26	1,43	1,58	1,68	1,79	1,89	1,89

		1.1. Laju pertumbuhan Ekonomi.		-1,38	2,59	2,94	4,23	4,57	4,68	4,81	4,81
	Sasaran 1.1.1. Meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian dan usaha mikro.		1.1.1.1. Laju Pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK)	1,03	1,08	1,13	1,19	1,25	1,31	1,38	1,38
			1.1.1.2. Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro. (%)	Jumlah pelaku usaha mikro tahun 2020 13.447	2	2	2	2	2	2	Jumlah pelaku Usaha mikro tahun 2026 15.143
			1.1.1.3. Laju pertumbuhan nilai tambah produk usaha mikro (%)	Nilai produksi usaha mikro tahun 2020 Rp. ...	2	2	2	2	2	2	Nilai produk si usaha mikro tahun 2026.
	Sasaran 1.1.2. Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata terhadap perekonomian daerah.		1.1.2.1. Laju Pertumbuhan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)	-19,70	0,69	1,39	2,07	2,76	3,44	4,13	4,13

			1.1.2.2. Jumlah kunjungan wisatawan	676,382	683,146	689,977	696.877	703.846	710.864	717.993	717.993
	Sasaran 1.1.3. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan Kawasan.		1.1.3.1. Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)	-11,80	1,20	1,38	2,57	2,60	3,49	4,26	4,26
			1.1.3.2. Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	77,31	78,44	80	82	84	86	88	88
	Sasaran 1.1.4. Meningkatnya nilai realisasi investasi		1.1.4.1. Persentase peningkatan nilai realisasi investasi.	150,5 Milyar	10	10	15	17	19	22	Realisasi investasi di tahun 2026 menjadi Rp.353,38 Milyar (naik 135 % dari tahun 2020)
Misi 3 :	Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang wilayah dan migitasi bencana.										
Tujuan	Sasaran	Indikator		Kondisi Awal (2020)	Target						
		Tujuan	Sasaran		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode

Tujuan 1. Mewujudkan pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan mitigasi bencana.		1.1. Tingkat Kapasitas Ketahanan Daerah		Na	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	Sasaran 1.1.1. Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam		1.1.1.1 Indeks kualitas lingkungan hidup	67,37	67,37	67,80	68,22	68,65	69,08	69,50	69,50
	Sasaran 1.1.2. Meningkatnya Ketaatan Terhadap Tata Ruang		1.1.2.1. Indeks ketaatan terhadap tata ruang	98,55	98,60	98,60	98,65	98,65	98,65	98,70	98,70
	Sasaran 1.1.3. Berkurangnya resiko bencana terhadap manusia dan lingkungan		1.1.3.1. Pesentase penanggulangan bencana yang terintegrasi.	67,41	71,00	75,0	79,0	83,0	87,0	91,0	91,0
Misi 4	Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter										
Tujuan	Sasaran	Indikator		Kondisi Awal (2020)	Target						
		Tujuan	Sasaran		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode
Tujuan 1. Terwujudnya		1.1. Indeks		72,46	73,06	73,65	74,33	75,02	75,73	76,31	76,31

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter.		Pembangunan Manusia									
	Sasaran 1.1.1. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter		1.1.1.1. Angka Harapan Lama Sekolah	13,87	14,09	14,31	14,53	14,76	14,98	15,2	15,2
			1.1.1.2. Rata-rata lama sekolah	8,96	9,03	9,16	9,3	9,43	9,57	9,7	9,7
	Sasaran 1.1.2. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas		1.1.2.1. Angka harapan hidup	72,37	72,55	72,74	72,92	73,1	73,29	73,47	73,47
Tujuan 2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berdaya saing		2.1. Nilai Produktivitas Total Daerah		59,46	59,64	59,82	60,00	60,18	60,36	60,54	60,54
	Sasaran 2.1.1. Meningkatnya daya saing angkatan kerja.		2.1.1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka.	4,51	4,38	4,3	4,15	4,02	3,86	3,67	3,67
	Sasaran 2.1.2. Meningkatnya daya saing pemuda		2.1.2.1. Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	30	90	91	92	93	94	95	95
			2.1. 2.2. Jumlah cabang olah raga	34	38	38	38	38	38	38	38

			berprestasi yang dibina.								
	Sasaran 2.1.3. Meningkatnya ketahanan pangan Daerah		2.1.3.1. Indeks Ketahanan Pangan Daerah	84,1	86	88	90	92	94	96	96
Tujuan 3 : Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial		3.1. Indeks Kesejahteraan rakyat		54,60	70,83	73,14	75,47	78,02	80,35	82,90	82,90
	Sasaran 3.1.1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		3.1.1.1. Jumlah nagari dengan status IDM :								
			Mandiri	10	13	16	19	22	25	28	28
			Maju	46	47	48	49	50	51	52	52
			Berkembang	26	22	18	14	10	6	2	2
			3.1.1.2. Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	67,49	67,49	68,56	69,65	70,76	71,88	73,02	73,02
			3.1.1.3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,01	97,04	97,07	97,10	97,13	97,16	97,19	97,19
			3.1.1.4. Indeks perlindungan Anak	55	60	60	63	66	69	72	75
	Sasaran 3.1.2. Terkendalinya laju pertumbuhan		3.1.2.1. Total Fertility Rate	2,68	2,59	2,51	2,43	2,35	2,27	2,20	2,20

	penduduk										
Misi 5	Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK										
Tujuan	Sasaran	Indikator		Kondisi Awal (2020)	Target						
		Tujuan	Sasaran		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode
Tujuan 1 : Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya		1.1. Indeks Keamanan Masyarakat.		61,05	67,96	71,88	80,42	84,33	88,25	92,28	92,28
	Sasaran 1.1.1. Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum		1.1.1.1. Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	6,02	5,69	5,36	5,02	4,69	4,36	4,02	4,02
			1.1.1.2. Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan.	75	85	95	100	100	100	100	100
			1.1.1.3. Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran.	65	100	100	100	100	100	100	100

		1.2. Persentase Nagari Madani pada Level V		6,10	9,76	13,41	17,07	20,73	24,39	28,05	28,05
	Sasaran 1.2.1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai- nilai agama, adat dan budaya		1.2.1.1. Jumlah Nagari Madani pada level :								
			- Level V	5	8	11	14	17	20	23	23
			- Level IV	20	21	22	23	24	25	26	26
			- Level III	36	37	38	39	41	37	33	33
			- Level II	21	16	11	6	0	0	0	0
			1.2.1.2. Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	66,67	69,19	71,72	74,24	76,77	79,29	81,82	81,82
			1.2.1.3. Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan.	51	51	52	55	60	65	70	70

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian diatas dapat ditentukan beberapa isu-isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk 5 tahun kedepan yaitu:

- p. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan aksesibilitas infrastruktur jalan dan jembatan.
- q. Cakupan layanan Penduduk berakses air minum layak mencapai 84,96 %.
- r. Jumlah Rumah Tangga dengan sanitasi baik mencapai 78,07 %
- s. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air di saluran irigasi
- t. Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten mencapai 86,00 % .
- u. Irigasi yang ada belum mampu menyediakan air dalam jumlah yang cukup, hal ini dikarenakan hanya 67.06 % peningkatan luas lahan sawah yang beririgasi.
- v. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang.
- w. Masih banyaknya daerah genangan air hujan di Kawasan perkotaan, yang tertangani mencapai 39.79 %.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan pembangunan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Mengacu pada Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam 2021 – 2026, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam kedudukannya berfungsi membantu Bupati di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terkait dengan **misi pertama, kedua, ketiga dan keempat** RPJMD Kabupaten Agam 2021–2026.

Mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi dan isu-isu strategis dibidang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dirumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021-2026.

Adapun Tujuan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 – 2026

Misi1 RPJMD:	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani								
Prioritas RPJMD :	Membangun Birokrasi yang Modern dan Efektif								
Tujuan RPJMD:	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Melayani								
Sasaran RPJMD:	Meningkatnya kepuasan masyarakat								
Tujuan Renstra DPUTR	Sasaran Renstra DPUTR	Indikator Sasaran	Tahun (%)						
			Base d Line 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	IndekKepuasan Masyarakat (IKM)	82,87	83	83,5	84	84,5	85	85,5
	Tersedianya sarana pelayanan	Jumlah Gedung Kantor	30	31	32	33	34	35	36

	public	yang dibangun							
	Meningkatnya Jumlah Usaha Jasa konstruksi yang dibina	Persentase Usaha Jakon yang dibina	75	75	80	85	90	90	95

Misi 2 RPJMD :	Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata.								
Prioritas RPJMD :	Membangun/mengembangkan pariwisata dengan kearifan lokal (Halal Tourism)..								
Tujuan RPJMD:	Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.								
Sasaran RPJMD:	Meningkatkan Konektifitas Wilayah dan Kawasan. Meningkatnya Produktifitas Usaha Pertanian dan Industri Pengolahan.								
Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Tahun						
			Base d Line 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Produksi Usaha Pertaniandan Industri Pengolahan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	82,70	83,72	85,47	86,49	87,57	88,56	89,63
Berkurangnya resiko bencana terhadap manusia dan Lingkungan	Berkurangnya kawasan rawan banjir di WS kewenangan kabupaten	Rasio luas kawasan pemukiman kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS kewenangan kabupaten	-	-	21.05 %	15,78 %	21.05 %	26.31 %	15.78%

Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Kawasan	Meningkatnya Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	80.26	81.32	82.36	83.15	84.51	85.57	86.13
---	---	------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Misi 3 RPJMD :	Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana
Prioritas RPJMD:	Pembangunan yang sesuai dengan lingkungan, tataruang, dan responsive terhadap mitigasi bencana.
Tujuan RPJMD :	Mewujudkan pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan mitigasi bencana
Sasaran RPJMD:	<ol style="list-style-type: none"> Berkurangnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dan sumber daya alam. Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang.

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Tahun						
			Base d Line 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Berkurangnya Pengrusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.	Meningkatnya Jalan Lingkungan Kondisi baik	Persentase Jalan lingkungan kondisi baik	44.72	45.72	48.22	50.72	53.22	55.72	58.22
	Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78.03	79.03	80.03	81.03	82.03	83.03	84.03
	Berkurangnya titik genangan air di Kawasan Permukiman	Persentase Jumlah Titik Genangan Air yang ditangani	33.83	34.83	43.83	53.83	63.83	73.83	83.83
Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang.	Meningkatnya Kinerja tata Ruang Daerah	Persentase Kesesuaian Pemamfaatan ruang dengan Tata Ruang	98.55	98.60	98.60	98.60	98.60	98.65	98.65

	Meningkatnya Lingkungan dan Bangunan yang tertata	Persentase Lingkungan dan Bangunan yang tertata	17.10	17.79	18.58	19.48	20.48	21.58	22.78
--	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Misi 4 RPJMD:	Membangun Masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter								
Prioritas RPJMD :	Pembangunan dan pemerataan infrastruktur								
Tujuan RPJMD :	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter								
Sasaran RPJMD :	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas								
Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Tahun						
			Base d Line 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas.	Meningkatnya Penduduk Berakses Air Minum Layak.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak.(%).	78,03	79,03	80,03	81,03	82,03	83,03	84,03
Meningkatnya daya Saing Angkatan Kerja	Meningkatnya Kompetensi Pekerja Konstruksi	Rasio Tenaga Operator dan Teknis /Analis yang bersertifikat.	33,83	34,83	43,83	53,86	63,83	73,83	83,83

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2021-2026.

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara mencapai sasaran sebagaimana ditunjukkan oleh indikator kinerja sasaran. Adapun strategi dan kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021-2026

Misi 1 RPJMD :	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani.		
Prioritas RPJMD :	Membangun Birokrasi yang Modern dan Efektif.		
Tujuan RPJMD :	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Melayani		
Sasaran RPJMD :	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.		
Tujuan Renstra DPUTR	Sasaran Renstra DPUTR	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menyediakan kebutuhan dan fasilitas kerja serta operasional aparatur yang lebih memadai ✓ Membuat inovasi baru dalam pelayanan publik 	Menerapkan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	Tersedianya sarana pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Membangun gedung kantor baru 	Meningkatkan Pelayanan dan Prasarana Kantor
	Meningkatnya Jumlah Usaha JasaKonstruksi yang dibina	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menyusun Regulasi Pelayanan IUJK yang efisien dan efektif sesuai dengan aturan 	Melakukan Pembinaan dan Meningkatkan Layanan kepada Pelaku JasaKonstruksi
	Meningkatnya Jumlah Bangunan Gedung yang berizin	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembinaan dan Pengaturan Bangunan Gedung 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyusunan data dan informasi bangunan gedung yang telah terbangun ✓ Pengendalian dan pengawasan penerapan persyaratan bangunan gedung/laikfungsi

Misi 2 RPJMD :	Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata		
Prioritas RPJMD :	Membangun/mengembangkan pariwisata dengan kearifan lokal(Halal Tourism)..		
Tujuan RPJMD :	Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat		
Sasaran RPJMD :	1. Meningkatnya Produksi Usaha Pertanian dan Industri Pengolahan 2. Meningkatkan konektifitas wilayah dan Kawasan.		
Tujuan Renstra DPUTR	Sasaran Renstra DPUTR	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Produksi Usaha Pertanian dan Industri Pengolahan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Kondisi Baik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan dan memperluas akses transportasi di kawasan permukiman dan pusat pemerintahan kecamatan dan nagari ✓ Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dari jalan arteri nasional dengan kawasan-kawasan perkotaan,kawasan strategis dan kawasan produktif 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembangunan dan Pemeliharaanjalan dan jembatan Kabupaten ✓ Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Jalan dan Jembatan Kabupaten ✓ Penambahan alat berat baru dan Pemeliharaan alat berat yang ada
Meningkatnya Konektifitas Wilayah dan Kawasan	Meningkatnya Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menciptakan sistem irigasi yang mampu menjamin produksi pertanian dan menjaga ketahanan pangan ✓ Meningkatkan ketersediaan air baku, melalui peningkatan kemampuan catchment di daerah hulu (konservasi sumber daya air) dan membangun bangunan bendung dan penampung 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi ✓ Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi ✓ Memberdayakan masyarakat petani pemakai air

Misi 3 RPJMD	Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana		
Prioritas RPJMD :	Pembangunan yang sesuai dengan lingkungan, tata ruang, dan responsive terhadap mitigasi bencana		
Tujuan RPJMD :	Mewujudkan pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan mitigasi bencana		
Sasaran RPJMD :	3. Berkurangnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. 4. Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang. 5. Berkurangnya resiko bencana terhadap manusia dan lingkungan.		
Tujuan Renstra DPUTR	Sasaran Renstra DPUTR	STRATEGI	KEBIJAKAN
Berkurangnya Pengrusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.	Berkurangnya Kawasan Rawan Banjir di WS Kewenangan Kab	✓ Pengendalian daya rusak air dari Hulu sampai Hilir Sungai	Pembangunan Pengaman dan Normalisasi Sungai
	Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	✓ Pengendalian Pencemaran Akibat Limbah Domestik ✓ Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah domestik	✓ Mengembangkan IPAL Skala Lingkungan dan Skala Kawasan pada Kawasan Perumahan ✓ Penyediaan dan pembangunan infrastruktur dasar dan PSU
	Berkurangnya titik genangan air di Kawasan Permukiman	✓ Pengurangan daerah genangan air di Kawasan Perkotaan	✓ Tata Kelola genangan air di Kawasan Perkotaan
	Meningkatnya Jalan Lingkungan Kondisi Baik	✓ Peningkatan Kualitas Jalan Jalan Lingkungan di Kawasan Pemukiman dan Kawasan Sosial Budaya lainnya	✓ Meningkatkan aksesibilitas di Kawasan Pemukiman dan Kawasan disekitarnya
	Meningkatnya Jumlah Bangunan yang ber IMB	✓ Pengendalian pemanfaatan ruang dengan melibatkan peranserta stakeholder serta masyarakat akan pentingnya pengelolaan ruang yang baik.	✓ Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat untuk tindakan preventive dan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang
	Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan IMB sesuai peruntukannya	✓ Pembinaan dan Pengaturan Bangunan Gedung.	✓ Penyusunan data dan informasi bangunan gedung yang telah terbangun ✓ Pengendalian dan

			pengawasan penerapan persyaratan bangunan gedung/ Laik fungsi
	Meningkatnya Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat	✓	✓ Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Misi 4 RPJMD :	Membangun Masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter		
Prioritas RPJMD :	Pembangunan dan pemerataan infrastruktur		
Tujuan RPJMD :	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter		
Sasaran RPJMD :	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas		
Tujuan Renstra DPUTR	Sasaran Renstra DPUTR	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas.	Meningkatnya Penduduk Berakses Air Minum Layak.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengendalian Pencemaran Akibat Limbah Domestik ✓ Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah domestik 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengembangkan IPAL Skala Lingkungan dan Skala Kawasan pada Kawasan Perumahan ✓ Penyediaan dan pembangunan infrastruktur dasar dan PSU

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Berikut Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2021-2026:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021-2026
Kabupaten Agam

Misi 1 RPJMD : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,
 Prioritas RPJMD : Penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi .
 Tujuan RPJMD : Penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi .
 Sasaran RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

No	Tujuan Renstra DPUTR	Sasaran Renstra DPUTR	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran			Indikator Sasaran:															
					Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)															
					Program:															
					Indikator Kinerja Program (outcome):															
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pemenuhan operasional kantor dan gaji dan tunjangan ASN	75%	80%	9,164,530,000	90%	9,714,510,000	95%	10,394,520,000	100%	10,914,250,000	100%	11,459,960,000	100%	11,459,960,000		Sekretariat
					Indikator Kinerja Kegiatan															
					Output :															
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	6,700,000,000	100%	6,800,000,000	100%	6,900,000,000	100%	7,000,000,000	100%	7,100,000,000	100%	7,100,000,000		
					Sub Kegiatan :															
					Output :															
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	5,700,000,000	100%	5,800,000,000	100%	5,800,000,000	100%	5,900,000,000	100%	5,900,000,000	100%	5,900,000,000		
					Sub Kegiatan :															
					Output :															
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terbayarnya Gaji Tenaga PTT dan THL	100%	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,200,000,000		
					Indikator Kinerja Kegiatan															
					Output :															
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terjaminya kendaraan dinas maupun operasional kantor	100%	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000		
					Sub Kegiatan :															
					Output :															
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Jaminan terhadap barang milik daerah	100%	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000		
					Output :															
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	700,000,000	100%	750,000,000	100%	800,000,000	100%	850,000,000	100%	900,000,000	100%	900,000,000		

			Sub Kegiatan :	Output :															
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	175,000,000	100%	190,000,000	100%	200,000,000	100%	210,000,000	100%	220,000,000	100%	220,000,000		
			Sub Kegiatan :	Output :															
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya bahan logistik kantor	100%	100%	14,000,000	100%	20,000,000	100%	30,000,000	100%	40,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000		
			Sub Kegiatan :	Output :															
			Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya Bahan Cetakan dan penggandaan	100%	100%	42,000,000	100%	45,000,000	100%	60,000,000	100%	70,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000		
			Sub Kegiatan :	Output :															
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	469,000,000	100%	495,000,000	100%	510,000,000	100%	530,000,000	100%	550,000,000	100%	550,000,000		
			Kegiatan:	Output :															
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan perkantoran	100%	100%	350,000,000	100%	400,000,000	100%	450,000,000	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	550,000,000		
			Sub Kegiatan :	Output :															
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	190,000,000	100%	220,000,000	100%	240,000,000	100%	270,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000		
			Sub Kegiatan:	Output :															
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	100%	160,000,000	100%	180,000,000	100%	210,000,000	100%	230,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000		
			Kegiatan:	Indikator Kinerja Kegiatan															
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Output : Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan perkantoran	100%	100%	700,000,000	100%	750,000,000	100%	800,000,000	100%	850,000,000	100%	900,000,000	100%	900,000,000		
			Sub Kegiatan:	Output :															
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dipeliharanya dan dibayarnya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000		
			Sub Kegiatan:	Output :															
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dipeliharanya Peralatan dan Mesin lainnya	100%	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000		

				Sub Kegiatan:	Output :															
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Ktr dan Bangunan Lainnya	Persentase ketersediaan Penunjang Operasional Jasa perkantoran	100%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000				
				Kegiatan:	Output :	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000				
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program															
				Sub Kegiatan:	Output :															
				Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dok	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Program Kegiatan	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000				
				Kegiatan :	Output :	100%	100%	594,530,000	100%	889,510,000	100%	1,314,520,000	100%	1,579,250,000	100%	1,869,960,000	100%	1,869,960,000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor															
				Program :	Indikator Kinerja Program :															
			Meningkatnya Jumlah Bangunan yang ber IMB	Penataan Bangunan Gedung	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Bangunan Gedung yang Represif															
				Kegiatan :	Output :	70.00	70.00	8,507,110,000	75.00	5,364,000,000	80.00	5,364,000,000	85.00	5,364,000,000	95	9,364,000,000	95	33,963,110,000	DPUTR	
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung diwilayah daerah Kabupaten/Kota, pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan (TABG), Pendataan Bangunan Gedung Serta Implementasi SIMBG	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Pemerintah															
				Sub Kegiatan :	Output :	36.00	36.00	8,308,894,337	38.00	5,239,018,800	40.00	5,239,018,800	42.00	5,239,018,800	46	9,145,818,800	46	33,171,769,537	DPUTR	
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Pemerintah															
				Sub Kegiatan	Output :	150.00	150.00	283,286,763	160.00	178,621,200	170.00	178,621,200	180.00	178,621,200	200	311,821,200	200.00	1,130,971,563	DPUTR	
				Pengelolaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung,	jumlah rekomendasi persetujuan Bangunan Gedung															

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021-2026
Kabupaten Agam

Misi 2 RPJMD : Membangun Perekonomian Masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata.
 Prioritas RPJMD : Membangun/ mngembangkan pariwisata dengan kearifan lokal (Halal Tourism)
 Tujuan RPJMD : Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
 Sasaran RPJMD : 1. Meningkatnya Produksi Usaha Pertanian dan Industri Pengolahan
 : 2. Meningkatnya konektivitas wilayah dan kawasan.

No	Tujuan Renstra DPUR	Sasaran Renstra DPUR	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung g.Jawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)	
I	Meningkatnya Produksi Usaha Pertanian dan Industri Pengelolaan				Indikator Sasaran :																
					Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan																
1	Meningkatnya Jaringan Irigasi Kondidisi Baik																				
					Program:	Indikator Kinerja Program:															
					Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan luas lahan sawah yang beririgasi	44,4 persen	46,1 persen	12,000,000,000	47,8 persen	12,000,000,000	49,6 persen	12,000,000,000	51,2 persen	12,000,000,000	52,9 persen	12,000,000,000	52,92 persen	12,000,000,000		
					Kegiatan:	Output :	1543 Meter	400 Meter	1,650,000,000	400 Meter	1,650,000,000	400 Meter	1,650,000,000	400 Meter	1,650,000,000	400 Meter	1,650,000,000	3543 Meter	1,650,000,000		
					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai Yang Terpelihara															
					Sub Kegiatan :	Output :	1543 Meter	400 Meter	1,650,000,000	400 Meter	1,650,000,000	400 Meter	1,650,000,000	400 Meter	1,650,000,000	400 Meter	1,650,000,000	3543 Meter	1,650,000,000		
					Normalisasi / Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang terpelihara															
					Outcome																
					Kegiatan:	Output :	250 ha	250 ha	10,350,000,000	250 ha	10,350,000,000	250 ha	10,350,000,000	250 ha	10,350,000,000	250 ha	10,350,000,000	1250 ha	10,350,000,000		
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Area Sawah yang terairi															
					Outcome																
					Sub Kegiatan :	Output :	210 ha	210 ha	8,350,000,000	210 ha	8,350,000,000	210 ha	8,350,000,000	210 ha	8,350,000,000	210 ha	8,350,000,000	210 ha	8,350,000,000		
					Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Areal sawah yang terairi															
					Outcome																
					Sub Kegiatan :	Output :	40 ha	40 ha	2,000,000,000	40 ha	2,000,000,000	40 ha	2,000,000,000	40 ha	2,000,000,000	40 ha	2,000,000,000	40 ha	2,000,000,000		
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Areal sawah yang terairi															
					Outcome																

2		Meningkatnya Tingkat Komantapan Jalan Kabupaten.																	
			Program:	Indikator Kinerja Program:	78.44%	80.26%	60,354,000,000	81.06%	62,604,000,000	82.86%	65,884,000,000	83.46%	67,328,000,000	84.56%	69,944,000,000	84.56%	69,944,000,000		
			Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantab															
			Kegiatan:	Output :	100.00%	100.00%	60,354,000,000	100.00%	62,604,000,000	100.00%	65,884,000,000	100.00%	67,328,000,000	100.00%	69,944,000,000	100.00%	69,944,000,000		
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah ruas jalan yang terhubung															
			Sub Kegiatan :	Output :	22.80 km	39.79 km	57,086,149,736	40,10 km	59,009,364,710	40,30 km	61,929,901,181	40,30 km	62,978,491,299	40,50 km	65,159,540,428	40,50 km	65,159,540,428		
			Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan kondisinya															
			Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	3 km	4 km	469,437,500	3 km	516,381,250	4 km	568,019,375	3 km	624,821,313	3 km	687,303,444	3 km	687,303,444		
			Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhap / dipelihara															
			Sub Kegiatan :	Output :	2 unit	2 unit	2,630,000,000	2 unit	2,893,000,000	2 unit	3,182,300,000	2 unit	3,500,530,000	2 unit	3,850,583,000	2 unit	3,850,583,000		
			Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun															
			Sub Kegiatan :	Output :	3 unit	3 unit	168,412,764	3 unit	185,254,040	3 unit	203,779,444	3 unit	224,157,389	3 unit	246,573,128	3 unit	246,573,128		
			Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhap															

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2016-2021
Kabupaten Agam

Misi 3 RPJMD : Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana
 Prioritas RPJMD : Pembangunan yang sesuai dengan lingkungan, tata ruang dan responsive terhadap mitigasi bencana
 Tujuan RPJMD : Mewujudkan pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan mitigasi bencana
 Sasaran RPJMD : 1. Berkurangnya kerusakan dan pencemaran lingkungan
 : 2. Meningkatnya Ketaatan terhadap tata ruang

No.	Tujuan Renstra DPUTR	Sasaran Renstra DPUTR	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kdrangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik																		
				Program :	Indikator Kinerja Program :	78.05	79.00	1,688,110,000	81.00	1,751,520,000	83.00	1,839,100,000	85.00	1,931,050,000	87.00	2,027,260,000	89.00	9,237,040,000	DPUTR	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase RT dengan Sanitasi Baik															
				Kegiatan :	Output :	91,459	92,328	1,583,953,613	95,097	1,643,451,216	96,999	1,725,627,530	98,939	1,811,904,215	100,918	1,902,178,058	100,918	8,667,114,632	DPUTR	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang telah terlayani dengan IPAL															
				Sub Kegiatan :	Output :	91,459	92,328	1,583,953,613	95,097	1,643,451,216	96,999	1,725,627,530	98,939	1,811,904,215	100,918	1,902,178,058	#REF!	8,667,114,632	DPUTR	
				Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah sistem Pengelolaan Air Limbah yang Dibangun (SR)															
				Sub Kegiatan :	Output :	12.00	12.00	60,771,960	12.00	63,054,720	12.00	66,207,600	12.00	69,517,800	12.00	72,981,360	12.00	332,533,440	DPUTR	
				Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Operasional DAK Sanitasi (12 bulan)															
				Sub Kegiatan :	Output :	12.00	12.00	43,215,616	12.00	44,838,912	12.00	47,080,960	12.00	49,434,880	12.00	51,897,856	12.00	236,468,224	DPUTR	
				Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Operasional IPLT (12 bulan)															
		Berkurangnya titik Genangan Air dikawasan Permukiman		Program :	Indikator Kinerja Program :	39.87	40.64	2,192,400,000	41.64	2,214,324,000	42.64	2,325,050,200	43.64	2,441,291,200	40.21	2,563,359,800	41.00	11,736,425,200	DPUTR	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Jumlah Titik Genangan Air yang ditangani															

			Kegiatan :	Output :	598,990	603,602.22	2,192,400,000	609,638.25	2,214,324,000	615,734.63	2,325,050,200	621,891.97	2,441,291,200	628,110.89	2,563,359,800	628,110.89	11,736,425,200	DPUTR	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kab/Kota	Panjang Drainase /Gorong-gorong yang (m) ditangani															
			Sub Kegiatan :	Output :	598,990	603,602.22	2,192,400,000	609,638.25	2,214,324,000	615,734.63	2,325,050,200	621,891.97	2,441,291,200	628,110.89	2,563,359,800	628,110.89	11,736,425,200	DPUTR	
			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Drainase /Gorong-gorong yang (m) ditangani															
	Meningkatnya Jalan Lingkungan Kondisi Baik		Program :	Indikator Kinerja Program :	46.00	49.00	5,682,170,000	52.00	5,863,940,000	55.00	6,045,710,000	58.00	6,227,480,000	61.00	6,409,250,000	63.00	30,228,550,000	DPUTR	
			Pengembangan Permukiman	Persentase Jalan Lingkungan Permukiman Kondisi Baik															
			Kegiatan :	Output :	184,468.74	190,002.80	5,682,170,000	195,702.89	5,863,940,000	201,573.97	6,045,710,000	207,621.19	6,227,480,000	213,849.83	6,409,250,000	213,849.83	30,228,550,000	DPUTR	
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun															
			Sub Kegiatan :	Output :	184,468.74	190,002.80	5,682,170,000	195,702.89	5,863,940,000	201,573.97	6,045,710,000	207,621.19	6,227,480,000	213,849.83	6,409,250,000	213,849.83	30,228,550,000	DPUTR	
			Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun (m)															
	Meningkatnya Ketaatan terhadap Tata Ruang		Program :	Indikator Kinerja Program:															
			Penyelenggaraan Tata Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	98,60%	941,575,000	98,65%	1,750,000,000	98,65%	1,250,000,000	98,65%	1,250,000,000	98,70%	1,250,000,000	98,70%	1,250,000,000			
			Kegiatan:	Output :															
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Rencana Tata Ruang yang disusun atau ditetapkan	2 Dokumen	768,375,000	2 Dokumen	1,500,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000			
			Sub Kegiatan	Output :															
			Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RDTR yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	768,375,000	2 Dokumen	1,500,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000			
			Kegiatan:	Output :															
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	40 Rekomendasi	173,200,000	40 Rekomendasi	250,000,000	40 Rekomendasi	250,000,000	40 Rekomendasi	250,000,000	40 Rekomendasi	250,000,000	40 Rekomendasi	250,000,000			
			Sub Kegiatan	Output :															
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	40 Rekomendasi	173,200,000	40 Rekomendasi	250,000,000	40 Rekomendasi	250,000,000	40 Rekomendasi	250,000,000	40 Rekomendasi	250,000,000	40 Rekomendasi	250,000,000			

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 - 2026
Kabupaten Agam

Misi 4 RPJMD : Membangun Masyarakat yang Mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter
 Prioritas RPJMD : Peningkatan Kualitas SDM
 Tujuan RPJMD : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter
 Sasaran RPJMD : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas

No.	Tujuan Renstra DPUTR	Sasaran Renstra DPUTR	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kdrangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Meningkatnya Penduduk berakses Air Minum Layak																		
				Program :	Indikator Kinerja Program :	85.00	86.00	12,079,070,000	88.00	12,091,150,000	90.00	12,103,240,000	92.00	12,115,340,000	94.00	12,127,460,000	96.00	60,516,260,000	DPUTR	
				Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Berakses air minum layak															
				Kegiatan :	Output :	99,507	100,502	11,066,843,934	102,512	11,077,911,630	104,562	11,088,988,488	106,654	11,100,074,508	108,787	11,111,178,852	108,787	55,444,997,412	DPUTR	
				Pengelolaan dan pengembangan sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah RT yang memperoleh akses Air Minum															
				Sub Kegiatan :	Output :	99,507	100,502	1,012,226,066	102,512	1,013,238,370	104,562	1,014,251,512	106,654	1,015,265,492	108,787	1,016,281,148	108,787	5,071,262,588	DPUTR	
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR yang dibangun di Kawasan Perdesaan															
				Sub Kegiatan :	Output :	99,507	100,502	11,066,843,934	102,512	11,077,911,630	104,562	11,088,988,488	106,654	11,100,074,508	108,787	11,111,178,852	108,787	55,444,997,412	DPUTR	
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR yang ditingkatkan dikawasan Perdesaan															
		Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki Sertifikat																		
				Program:	Indikator Kinerja Program:		0,04%	560,898,000	0,04%	600,000,000	0,04%	600,000,000	0,04%		0,04%		0,04%			
				Pengembangan Jasa Konstruksi	persentase terbinanya pelaku usaha jasa konstruksi															

		Kegiatan:	Output :																
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Mewujudkan tenaga kerja yang andal dan berdaya saing		160,898,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000						
		Sub Kegiatan :	Output :																
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang mengikuti pelatihan	100 orang	200,000,000	100 orang	200,000,000	100 orang	200,000,000	100 orang	200,000,000	100 orang	200,000,000	100 orang					
		Sub Kegiatan :	Output :																
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000				
		Sub Kegiatan :	Output :																
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000				
		Kegiatan:																	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Jasa Konstruksi Cakupan		1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000				
		Sub Kegiatan :	Output :																
		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000		
		Sub Kegiatan :	Output :																
		Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrasi	Jumlah orang yang mengikuti penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000		
		Sub Kegiatan :																	
		Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha	1 Dok	150,000,000	1 Dok	150,000,000	1 Dok	150,000,000	1 Dok	150,000,000	1 Dok	150,000,000	1 Dok	150,000,000				

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu kepada tujuan dan sasaran pada BAB IV, ditetapkan kinerja Renstra Tahun 2021-2026 dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai berikut :

Tabel 7.1. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2016–2021

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 2015	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran							
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	75	77	80	82	85	85	85
	Sasaran Strategis 2	Tersedianya sarana pelayanan publik							
2	Jumlah gedung kantor yang dibangun	4	3 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	33 unit
	Sasaran Strategis 3	Sesuai pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang							
3	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dok. Tata ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang yang akuntabel	12%	18%	24%	29%	35%	41%	47%	47%
	Sasaran Strategis 4	Tersedianya infrastruktur dasar dan konektivitas							
5	Persentase peningkatan konektivitas wilayah	98%	98,5%	98,9	99%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	80%	83%	85%	87%	90%	95%	98%	98%
7	Persentase alat berat yang berkondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Panjang jalan dalam kota dalam kondisi baik	165,17 km	165,17 km	172,17 km	179,17 km	186,17 km	193,17 km	200,17 km	200,17 km
9	Panjang jalan lingkungan perdesaan dalam kondisi baik	-	-	40 km	81 km	122 km	160 km	198 km	198 km
10	Persentase rumah tangga ber akses air	81,7%	81,7%	90%	95%	100%	100%	100%	100%

	minum layak								
11	Persentase terbinanya pelaku usaha jasa konstruksi	-	-	-	-	25%	25%	25%	75%
12	Persentase jumlah titik genangan air yang tertangani	-	28%	30%	33%	36%	39%	43%	43%
	Sasaran Strategis 5	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya air dan irigasi							
13	Persentase luas sawah yang terlayani air irigasi	60,2%	62,62%	64,2%	65,5%	67%	68,5%	70%	70%

Berdasarkan indikator kinerja diatas ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021–2026 sebagai berikut:

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021–2026

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 2015	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sasaran Strategis 2	Tersedianya sarana pelayanan publik							
1	Jumlah gedung kantor yang dibangun	4	3 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	7 unit	33 unit
	Sasaran Strategis 3	Sesuaiinya pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang							
2	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang yang akuntabel	12%	12%	24%	30%	47%	60%	65%	65%
	Sasaran Strategis 4	Tersedianya infrastruktur dasar dan konektifitas							
3	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	80%	83%	85%	87%	90%	95%	98%	98%
4	Persentase rumah tangga ber akses air minum layak	81,7%	81,7%	90%	95%	100%	100%	100%	100%

5	Persentase jumlah titik genangan air yang tertangani	-	-	30%	33%	36%	39%	43%	43%
	Sasaran Strategis 5	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya air dan irigasi							
6	Persentase luas sawah yang terlayani air irigasi	60,2%	62,62 %	64,2 %	65,5 %	67%	68,5%	70%	70%

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis ini merupakan bentuk komitmen dari Kepala Dinas dan seluruh staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam, untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Untuk kesinambungan pembangunan khususnya dibidang prasarana jalan, jembatan dan pengairan, diperlukan perhatian dan persepsi yang sama dari semua pihak yang terkait agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Agam. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap pembangunan prasarana agar pembangunan tersebut dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Sebagai suatu Dinas di Kabupaten Agam yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dalam bidang ke-PU-an, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bertekad berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Agam.

Dengan disusunnya Revisi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam ini, berarti seluruh personil Dinas PUTR telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan dimasa depan, dan berorientasi pada hasil yang dicapai pada kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang akan datang dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis inilah yang akan mengilhami tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dimasa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi dan berkesinambungan.

Lubuk Basung, November 2021



**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG**

ORFIZON, ST

NIP : 19690727 199803 1 004